

Madura Darurat FPI! Mengapa Aparat Setempat Mati Kutu?

written by Ahmad Khoiri



Harakatuna.com - Tunggu, jangan keburu merah telinga dulu. Kemarin, saat tagar #MaduraUsutTuntasKM50, beredar tulisan begini,

“Awalnya ibadah haji yg ditunda gegara covid (rukun Islam kelima), lalu kotak infag disita alasan terorisme (rukun Islam keempat), puasa sih belum diganggu cuma ledul Fitri nya dilarang silaturahmi (rukun Islam ketiga), shalat jg belum dilarang tp masjidnya dituduh sarang radikalisme dan terorisme (rukun Islam kedua), tinggal syahadat (rukun Islam pertama) yg belum ada indikasi direcokin.... kepikiran gak Kelen?”

Tulisan macam apa itu? Sangat provokatif. Seolah hari ini Islam sedang dikeroyok hendak dihabisi sama sekali. Seolah mereka, para provokator itu, paling konsekuen terhadap Islam. Covid-19 adalah musibah global yang harus diwaspadai, bukan didesain sengaja untuk mendiskreditkan agama tertentu. Lagi pula, Islam tidak segoyah yang mereka bayangkan. Namun kenapa Madura kini tampak bergejolak lebih kencang dan tempramental?

Sebelumnya, saya telah mengulas bahwa Islam di Madura kini krisis filosofi *Bhuppa'-Bhâbbhu'-Ghuru-Rato*. Kesan kasar ketika berbicara, bahkan stigma primitif oleh masyarakat luar terhadap masyarakat Madura, kembali menyeruak seakan mendapat legitimasi dari masyarakat Madura itu sendiri. Sentimen keagamaan, terutama, semakin mengaburkan iklim kesantunan. Siapa yang membawa semua itu? FPI-lah dalang semuanya.

Jadi jika filosofi *Bhuppa'-Bhâbbhu'-Ghuru-Rato* menunjukkan krisis ketaatan masyarakat pada pemimpin (*rato*), krisis tersebut ternyata didorong oleh eksploitasi pihak yang dianggap berpengaruh sekaligus sadar bahwa dirinya jadi panutan masyarakat. Ketaatan tersebut kemudian dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk melahirkan politik penentangan (*contentious politics*). Perang pengaruh itulah akar semuanya, dan FPI bercokol di sana.

Pamekasan memulai kegaduhan. FPI di sana tidak bubar, sebab seorang kiai rendahan yang oportunistis, dengan pengaruh yang besar, melakukan kepak sayap radikalisme dengan alibi melawan rezim kezaliman. Dengan dana yang mengalir secara diam-diam, kiai-kiai kecil oportunistis yang tak perlu disebutkan namanya itu memobilisasi massa. Aparat pun mati kutu. Gejolak Islam di Madura kemudian searus dan bersamaan dengan menguatnya kebrutalan-keblateran.

Glorifikasi Keblateran

Blatèr adalah bahasa Madura yang artinya 'preman'. Sampang dan Bangkalan menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan seorang yang pemberani, tangguh, sekaligus berpengaruh. Daerah Pamekasan dan Sumenep menggunakan istilah lain, yaitu *Bâjing*. Belakangan orang Madura memperhalus gelar tersebut menjadi 'tokoh karismatik'. Namun hakikatnya sama. Dan di tangan *Blatèr* atau *Bâjing*, kekerasan dan perangai keras Madura menemukan tempatnya.

Keblateran menjelma sebagai status sosial. Semakin blater, semakin ia dianggap karismatik dan memiliki strata sosial yang tinggi. Dalam glorifikasi keblateran itulah, sebagian kecil orang Madura bangga dengan kekerasannya sendiri, yang mereka anggap sebagai sikap tegas dalam beragama. FPI menarik untung yang banyak dari keadaan ini, dan Madura telah mereka rombak untuk anti-kedamaian lalu kembali mengusung kekerasan.

Tentu saja hal ini tak ditandai hanya dengan trending baliho

[#MaduraUsutTuntasKM50](#), melainkan kekerasan-kekerasan bermotif serupa yang terjadi sebelumnya. Penggerudukan rumah ibunda Menko Polhukam Mahfud MD, demo dan arak-arakan massa yang terjadi berulang kali, adalah serangkaian manipulasi untuk mengglorifikasi keblateran di Madura. Saya tidak menyudutkan para kiai, tapi aktornya juga memakai jubah dan seragam FPI.

Sepertinya Madura menjadi satu-satunya harapan kebangkitan FPI. Sekali lagi, di sana aparat tidak bisa mengambil peran banyak, karena pengaruh mereka berada di bawah para tokoh agama yang dawuhnya menjadi patokan keputusan masyarakat. Karenanya, glorifikasi keblateran tidak sekadar berarti eksploitasi FPI terhadap iklim keislaman, melainkan eksploitasi FPI pada seluruh elemen bangsa; umat Islam, aparat, dan struktur pemerintahan.

Madura darurat FPI adalah bahasa lain dari 'Madura darurat kekerasan' atau 'Madurat krisis perdamaian'. Urusan tingkah laku, atau karakter, yang dari dulu terkenal sopan dan religius, sekarang secara total harus berganti menjadi kekejaman insidental jika FPI terusik. Yang paling menjengkelkan adalah, kuasa aparat tertimbun oleh glorifikasi blater tadi. Di bawah dikte manipulatif FPI, Madura hendak dijadikan senjata perang melawan negara. Ini darurat!

Aparat Jangan Impoten!

Otoritas guru (*ghuru*) dan pemimpin (*rato*) di Madura bersifat paten. Namun situasi politik sangat mampu mempolarisasi keduanya, bahkan mempertentangkan satu sama lain. Persoalan seperti siapa yang harus ditaati antara guru dan pemimpin, jawabannya cenderung ke guru. Sayangnya, mereka yang dianggap guru kerap kali bermain kepentingannya sendiri, dan mempolitisasi keadaan yang sekiranya menguntungkan pihaknya. Dalam hal ini, FPI dalangnya.

Namun semua itu tidak bisa menjadi alasan impotensi aparat untuk menindak mereka, bukan? Jika terjadi anarki, maka siapa pun harus bertanggung jawab. Kekerasan dan keblateran, atau premanisme berkedok Islam harus ditindak sama seperti seharusnya para ekstremis menanggung akibat perbuatan mereka. Otoritas dalam keamanan tidak ditentukan oleh kultur masyarakat tertentu, melainkan oleh kemaslahatan bangsa.

FPI bikin onar di Madura, menunggangi sejumlah kiai berpengaruh untuk

melancarkan politik konfrontatif mereka. Padahal, selamanya FPI adalah *backing-*an politikus yang menjadikan Islam sebagai kedok belaka. Jadi, mari langsung ke intinya: mengapa aparat di Madura diam melihat polah FPI? Dan jika memang berani bertindak, kapan mereka diberangus?

Wallahu A'lam bi ash-Shawab...